

## **PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI PENYESUAIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJEMPUT INDONESIA EMAS DARI TIMUR**

**Nurkhalik Wahdanial Asbara<sup>1</sup>, Mariah<sup>2</sup>, Raden Wirawan<sup>3</sup>, Danial<sup>4</sup>, Indah Suryani<sup>5</sup>, Putri Nurjannah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

[1nurkhalikwahdanial@gmail.com](mailto:nurkhalikwahdanial@gmail.com), [2mariah@nobel.ac.id](mailto:mariah@nobel.ac.id), [3raden@nobel.ac.id](mailto:raden@nobel.ac.id),

[4danial@gmail.com](mailto:danial@gmail.com), [5indahsuryani@gmail.com](mailto:indahsuryani@gmail.com), [6puja@gmail.com](mailto:puja@gmail.com)

---

### **Article History:**

*Received:* 08-02-2025

*Revised:* 11-02-2025

*Accepted:* 03-03-2025

**Keywords:** *Development, BUMDES, Policy.*

### **Abstract:**

*This activity is a striking phenomenon and requires serious attention from various parties. To overcome this problem, the results of the activities resulted in recommendations for more responsive policy reformulation, strengthening the capacity of human resources through training, and increasing synergy and partnerships between BUMDes, the government, and the private sector. Optimizing the utilization of local potential is also the key, where BUMDes can develop businesses based on natural resources and local wisdom. The implementation of this ideal concept is expected not only to increase the economic independence of villages, but also to reduce the development gap between the eastern and western regions of Indonesia. The methods used are training and counseling methods. The result of this service activity is to formulate and implement the ideal concept for the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as an economic pillar at the village level. Through an in-depth analysis of existing policies and challenges, it was found that there was a gap between government policies and practices in the field, limited capital, and low managerial capacity of BUMDes managers.*

---

## **PENDAHULUAN**

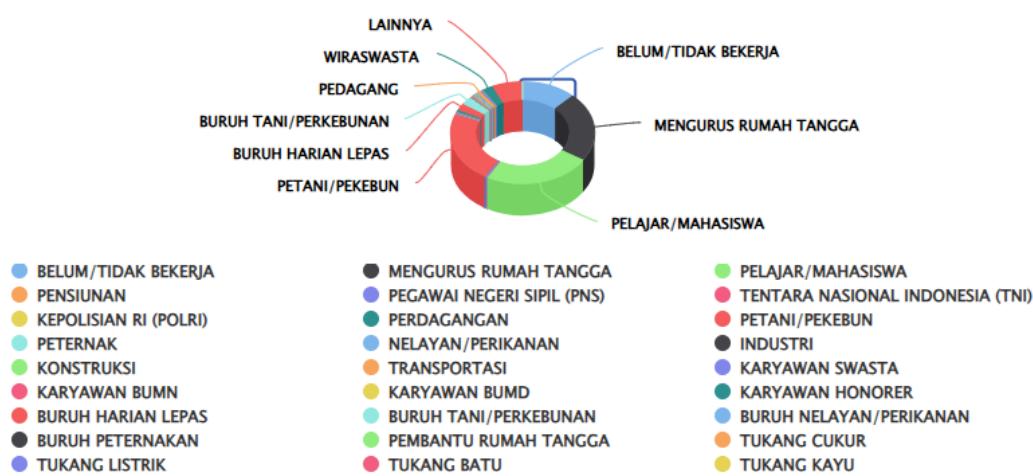
Desa Bonto Daeng terletak di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan keindahan alamnya dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat di desa ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, mencerminkan ketergantungan mereka pada sektor pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanaman utama yang dibudidayakan di desa ini meliputi padi, jagung, dan beragam sayuran, sementara kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan lokal menyuplai ikan segar ke pasar-pasar terdekat.

Dalam konteks ekonomi, meskipun sektor pertanian dan perikanan mendominasi, terdapat potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk local (Achmad et al., 2023) Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam mengelola usaha dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Harini et al., 2023). Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya juga menjadi peluang yang menjanjikan (Rahmatillah et al., 2019) Dengan keindahan alam yang dimiliki, Desa Bonto Daeng dapat menarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya lokal.

Namun, desa ini tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah dampak perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan nelayan dan petani. Naiknya

permukaan air laut dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, Desa Bonto Daeng memiliki potensi yang besar untuk berkembang, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan pendekatan yang tepat dalam pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, desa ini dapat mencapai kemajuan yang signifikan (Juliana et al., 2023). Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bonto Daeng. Berikut data demografi berdasarkan pekerjaan masyarakat desa Bonto Daeng:



**Gambar Data demografi berdasarkan pekerjaan**  
**Sumber: <https://www.bontodaeng.com/first/statistik/1>**

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Ramadana, 2013). BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arindhawati & Utami, 2020). BUMDes harus meningkatkan kesejahteraan pedesaan sejalan dengan era digital (Asbara et al., 2023). Dalam konteks Desa Bonto Daeng, Kabupaten Bantaeng, keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pengembangan ekonomi lokal. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak BUMDes, termasuk yang ada di Desa Bonto Daeng, tidak aktif. Ketidakaktifan ini menjadi fenomena yang mencolok dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

BUMDes memiliki tujuan yang lebih luas, antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli desa, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan layanan publik yang lebih baik (Senjani, 2019). Dengan adanya BUMDes, desa tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah, tetapi dapat berusaha mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Triyo et al., 2020). Manfaat lain dari BUMDes mencakup pemberdayaan masyarakat, di mana warga desa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa (Khairani & Yulistiyono, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Bonto Daeng adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Banyak pengelola BUMDes yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, komitmen dari anggota pengelola juga sering kali lemah, sehingga mengakibatkan kurangnya inisiatif untuk

mengembangkan usaha.

Ketidakaktifan BUMDes di Desa Bonto Daeng dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, terdapat faktor ekonomi yang mempengaruhi operasional BUMDes. Keterbatasan modal sering kali menjadi penghalang utama dalam menjalankan usaha (Naniek, 2019). Tanpa modal yang cukup, sulit bagi BUMDes untuk berinovasi dan menawarkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program BUMDes juga menjadi penyebab utama ketidakaktifan ini. Jika masyarakat tidak merasa memiliki dan tidak melihat manfaat dari BUMDes, maka partisipasi mereka akan berkurang, dan hal ini pada gilirannya akan berdampak pada keberlangsungan usaha.

Manajemen yang buruk juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan ketidakaktifan BUMDes (Wahyudi et al., 2021). Banyak BUMDes yang tidak memiliki sistem manajemen yang jelas dan transparan. Tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang akuntabel, BUMDes akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Ketidakpercayaan ini kemudian berdampak pada partisipasi masyarakat yang semakin menurun, menciptakan siklus negatif yang sulit untuk dihentikan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Melihat fenomena ketidakaktifan BUMDes di Desa Bonto Daeng, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan intervensi. Dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen, penyediaan modal, dan inovasi produk harus diberikan agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal (Satria et al., 2024). Selain itu, perlu adanya pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki dan berkontribusi terhadap keberhasilan BUMDes. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan BUMDes dapat kembali berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pakamundi, 2022). Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan BUMDes dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing. Dengan pencapaian target-target luaran yang telah ditetapkan, BUMDes akan menjadi motor penggerak ekonomi desa, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung visi Indonesia Emas. Kegiatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan pondasi yang kuat untuk pengembangan ekonomi desa di masa depan.

## **METODE**

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* atau ABCD. Sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Pertama, masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, termasuk pengurus dan anggota, akan menjadi sasaran utama untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan pemahaman mereka tentang pentingnya BUMDes dalam perekonomian lokal. Kedua, pemerintah desa dan pihak terkait akan dilibatkan dalam proses reformulasi kebijakan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa akan menjadi sasaran untuk mendapatkan pelatihan dan dukungan dalam pemasaran produk mereka, sehingga mereka dapat berkolaborasi dengan BUMDes. Selain itu, sasaran lain mencakup pemangku kepentingan seperti akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki peran dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif ini, diharapkan seluruh

elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam pengembangan BUMDes yang berkelanjutan dan membawa desa-desa di Timur Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah; (a) Persiapan dan Perencanaan. Mengidentifikasi tim pengabdi dan menentukan peran masing-masing anggota dan Menyusun rencana kegiatan yang mencakup tujuan, sasaran, metode, dan jadwal pelaksanaan. (b) Identifikasi Masalah. Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi BUMDes melalui wawancara dengan pengelola, anggota masyarakat, dan pemerintah desa. Mengumpulkan data tentang potensi lokal dan keberadaan BUMDes saat ini. (c) Pelatihan dan Workshop. Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk bagi pengelola BUMDes dan masyarakat dan Mengundang narasumber yang berpengalaman untuk memberikan materi dan berbagi praktik terbaik. (d) Diskusi Kebijakan. Mengadakan forum diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan BUMDes dan Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan. (e) Penyusunan Laporan. Menyusun laporan kegiatan yang mencakup hasil, analisis, dan rekomendasi untuk pengembangan BUMDes ke depan dan Menyebarluaskan laporan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap BUMDes.

## **HASIL**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui reformulasi kebijakan pemerintah dan pengembangan konsep ideal yang dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas, khususnya di daerah Timur. Dari langkah-langkah yang telah dijalankan hasil dari kegiatan ini terbagi atas beberapa tahap yang meliputi identifikasi masalah, pelatihan, reformulasi kebijakan, dan evaluasi.

### 1. Identifikasi Masalah

Tahap awal melibatkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh BUMDes di desa target. Melalui survei dan diskusi kelompok terfokus, ditemukan bahwa banyak BUMDes yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha, kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan, dan tantangan dalam pemasaran produk. Selain itu, akses terhadap pendanaan juga menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan BUMDes. Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa 80% pengelola BUMDes merasa tidak memiliki cukup informasi dan keterampilan untuk mengelola usaha secara efektif.

### 2. Pelatihan dan Workshop

Setelah mengidentifikasi masalah, kegiatan dilanjutkan dengan mengadakan serangkaian pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Pelatihan ini mencakup manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Dalam kegiatan ini, dilibatkan narasumber yang berpengalaman dari lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Sebanyak 60 peserta dari berbagai desa mengikuti pelatihan ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta merasa lebih percaya diri dalam menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh. Dari segi keterampilan, 75% peserta mampu menyusun rencana bisnis yang lebih baik, dan 65% menunjukkan peningkatan kemampuan dalam pemasaran.



**Gambar Suasana Pelatihan dan Workshop**

### 3. Penyesuaian Kebijakan

Melalui forum diskusi yang melibatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat, kegiatan berhasil merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna. Rekomendasi ini mencakup penyederhanaan proses administrasi untuk pengajuan dana desa, peningkatan alokasi dana untuk pelatihan BUMDes, dan penciptaan insentif bagi BUMDes yang berhasil meningkatkan kinerja usahanya. Hasil diskusi ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Penguatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes menjadi salah satu fokus utama.



**Gambar Forum Diskusi**

### 4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kapasitas BUMDes, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada pertanian tradisional kini memiliki tambahan pendapatan dari usaha yang dikelola oleh BUMDes. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kebijakan dan Permasalahan BUMDes**

Berdasarkan studi literatur dan analisis kebijakan, ditemukan beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengembangan BUMDes, antara lain *Pertama*, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mendorong pendirian dan pengembangan BUMDes, namun praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pemahaman dan kapasitas aparatur desa, serta lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. *Kedua*, terbatasnya modal dan sumber pendanaan: Salah satu kendala utama dalam pengembangan BUMDes adalah terbatasnya modal dan sumber pendanaan yang dapat diakses. Sebagian besar BUMDes masih bergantung pada dana desa atau modal awal yang terbatas, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas. *Ketiga*, Rendahnya kapasitas manajemen dan sumber daya manusia: Sebagian besar pengelola BUMDes belum memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam mengelola badan usaha. Hal ini berdampak pada lemahnya tata kelola, perencanaan strategis, dan inovasi dalam pengembangan usaha BUMDes. *Keempat*, Kurangnya sinergi dan kemitraan: Dalam banyak kasus, BUMDes masih berjalan sendiri-sendiri dan kurang menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah, swasta, atau lembaga keuangan. Hal ini menghambat upaya peningkatan skala usaha dan daya saing BUMDes. *Kelima*, Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal: Sebagian besar BUMDes belum secara optimal memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal di desa untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **Konsep Ideal Pengembangan BUMDes**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, tim pengabdian masyarakat merumuskan konsep ideal bagi pengembangan BUMDes, yang mencakup: *Pertama*, reformulasi kebijakan dan regulasi mencakup antara lain penyempurnaan UU Desa dan peraturan terkait untuk memperkuat peran dan kemandirian BUMDes. Penguatan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat sampai pemerintahan desa dalam pengembangan BUMDes, dan pengembangan skema pendanaan dan insentif bagi BUMDes, termasuk akses ke sumber pembiayaan, baik dari APBN, APBD, maupun lembaga keuangan. *Kedua*, Penguatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia mencakup antara lain peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengurus BUMDes melalui pelatihan, pendampingan, dan program pembinaan yang berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen BUMDes yang efektif, mulai dari perencanaan, pengelolaan usaha, tata kelola, hingga evaluasi kinerja, penguatan struktur organisasi BUMDes dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. *Ketiga*, Peningkatan sinergi dan kemitraan mencakup antara lain pengembangan skema kemitraan strategis antara BUMDes dengan pemerintah daerah, swasta, dan lembaga keuangan untuk memperkuat akses pasar, permodalan, dan transfer teknologi, fasilitasi pengembangan kluster usaha BUMDes yang terintegrasi dengan potensi lokal dan ekosistem ekonomi di wilayah, penguatan peran asosiasi BUMDes sebagai forum koordinasi, advokasi, dan pembelajaran bersama. *Keempat*, Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal mencakup pemetaan dan identifikasi potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan keunggulan komparatif desa sebagai basis pengembangan usaha BUMDes, pengembangan ragam unit usaha BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa, peningkatan nilai tambah produk dan jasa BUMDes melalui inovasi, teknologi, dan penguatan rantai pasok.

### **Implementasi Konsep Ideal Pengembangan BUMDes**

Untuk mengimplementasikan konsep ideal pengembangan BUMDes, diperlukan langkah-langkah strategis. *Pertama* Revisi dan harmonisasi kebijakan diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat landasan hukum dan kebijakan terkait BUMDes melalui penyesuaian Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah; selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan menyusun peraturan daerah atau petunjuk teknis yang mengatur secara komprehensif mekanisme pembentukan, pengelolaan, dan pembinaan BUMDes, serta pemerintah desa perlu menyusun Peraturan Desa mengenai Pendirian dan Pengelolaan BUMDes yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa

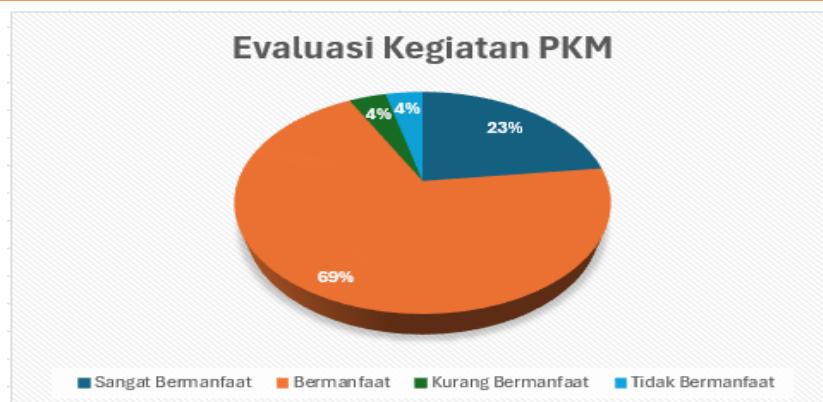
masing-masing. *Kedua*, Peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan manajemen BUMDes secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah bagi aparat desa serta pengurus BUMDes, di mana pemerintah desa juga perlu mengalokasikan anggaran desa untuk pengembangan kompetensi pengurus BUMDes yang mencakup studi banding dan pemagangan, serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau konsultan profesional untuk memperkuat manajemen BUMDes. *Ketiga*, Penguatan sinergi dan kemitraan dapat dicapai dengan pemerintah daerah yang memfasilitasi pembentukan asosiasi BUMDes di tingkat kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi dan pembelajaran bersama, sementara pemerintah desa dan BUMDes menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, swasta, lembaga keuangan, dan mitra lainnya untuk memperluas akses permodalan, pasar, teknologi, dan pengembangan usaha, serta BUMDes mengembangkan kluster usaha yang terintegrasi dengan potensi lokal dan ekosistem ekonomi di wilayah sekitar. *Keempat*, Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dilakukan melalui pemetaan dan identifikasi sumber daya alam, kearifan lokal, serta keunggulan komparatif desa oleh pemerintah desa dan BUMDes, yang selanjutnya mengembangkan ragam unit usaha sesuai potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta melakukan inovasi dan peningkatan nilai tambah produk serta jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi dan pengembangan rantai pasok.

#### Evaluasi Hasil Kegiatan Pengabdian

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tingkat ketercapaian target dari yang direncanakan telah dianggap tercapai. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pretest dan posttest seluruh peserta kegiatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kategori	Pretest	(%)	Posttest	(%)	Persentase Perubahan
Sangat Kurang Memahami	11	42%	3	12%	-31%
Kurang Memahami	7	27%	5	19%	-8%
Cukup Memahami	5	19%	6	23%	+8%
Memahami	2	8%	10	38%	+31%
Sangat Memahami	1	4%	2	8%	+4%
Total (orang)	26	100%	26	100%	

**Tabel Hasil Pre-test dan Post-tes Peserta**



**Gambar Hasil evaluasi peserta**

Adapun hasil evaluasi kegiatan pengabdian yang dihadiri sebanyak 26 peserta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk menjalankan BUMDES kedepannya dan menjadi pemicu meningkatnya ekonomi desa dan masyarakat.

## **PENUTUP**

Pengabdian ini berhasil merumuskan konsep ideal untuk pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi di tingkat desa. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan dan tantangan yang ada, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktiknya di lapangan, serta terbatasnya modal serta rendahnya kapasitas manajerial pengelola.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terstruktur, dan peningkatan sinergi antara BUMDes, pemerintah, dan sektor swasta. Pentingnya optimalisasi pemanfaatan potensi lokal juga harus menjadi fokus, di mana BUMDes dapat mengembangkan usaha yang berbasis pada sumber daya alam dan kearifan lokal. Dengan implementasi konsep ini, diharapkan kemandirian ekonomi desa dapat meningkat, serta kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia dapat diminimalkan. Dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan sangat penting agar BUMDes dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, berkontribusi pada pencapaian tujuan Indonesia Emas, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pelaksanaan kegiatan ini atas kontribusi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Dan Kerjasama yang baik dengan Mitra Bestari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bonto Daeng sebagai lokus pelaksanaan kegiatan ini. Terimakasih atas kerjasamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. N., Yulianti, S. D., Sharaha, M., Priandana, M. A., Khatimah, N., Hidayat, A. N., Handayani, Y. T., Aditya, D. F., & Dary, R. W. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sekitar Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 51–65.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Asbara, N. W., Nurrachma, N., Hidayat, M., Nurhaeda, Z., Izzanurdin, N., Viana, A., & Al Ailmunur, R. (2023). Strategi Pengembangan BUMDesa yang Berdaya Saing di Era Digitalisasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(2), 121–130.
- Harini, N., Suharyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363–375.
- Juliana, I., Safitri, N. L., & Fadillah, W. (2023). Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 01–13.
- Khairani, W., & Yulistiyono, H. (2023). Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://jurnal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/20036>
- Naniek, R. (2019). PROFIL UMK, PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMBERDAYAANNYA. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/55>
- Pakamundi, M. R. (2022). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*. <https://jurnalbrida.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/39>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Rahmatillah, T. P., Insyan, O., Nurafifah, N., & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 111–116.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/75712/keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-sebagai-penguatan-ekonomi-desa>
- Satria, R., Islam, N., & Sari, T. M. (2024). Optimalisasi Peran Bumdes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i2.5812>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40.
- Triyo, E., Haryono, H., & Irwantoro, I. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Cakrawala*, 14(2), 172–182.

Wahyudi, J., Ernawati, A., & Aini, S. Q. (2021). Revitalisasi pada Koperasi Unit Desa Berstatus Tidak Aktif: Studi Kasus di Kabupaten Pati. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 196–210.